

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta..
- Barata, Atep Adya, 2003, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Menghitung Obyek Dan Cara Pengajuan Keberatan Pajak*, PT Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Brotodiharjo, Santoso, 1991, *Pengantar Ilmu Pajak*, PT Erosco, Bandung.
- Dewanto Nur, Mukti Fajar dan Ahmad, Yulianto, 2006, *Dualisme Penelitian Hukum*, FH UMY Press, Yogyakarta.
- Harsono, Budi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi*, Djambatan, Jakarta.
- Mustofa, 2010, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, PT Karya Media, Yogyakarta.
- Perangin, Efendi, 1982, *Kumpulan Kuliah Pembuatan Akta*, PT Esa Studi, Jakarta.
- Parlindungan, A.P, 1999, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Saptomo, Ade, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya.
- Siahaan, Mariot Pahala, 2005, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Teori Dan Praktek Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Setiawan, Setu, 2009, *Perpajakan Indonesia Edisi 2009*, UMM Press, Malang.
- Soerodjo, Irawan, 2002, *Kepastian Hukum Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Suandy, Early, 2009, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi, 1998, *Metodologi Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dan Praktek*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara No.3746.

Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 Dan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

C. JURNAL/ARTIKEL

Harsono, Budi, 2000, *Hakikat Jabatan Notaris (Makalah Seminar Sehari Pada Orientasi Pengenalan Kampus)*, Jakarta 7 Agustus 2000.

Pradipta, Nando Gradeka, 2012, Skripsi, *Pelaksanaan Pemungutan BPHTB Di Kabupaten*

Sleman Dikaitkan Dengan Fungsi Regulered Dan Fungsi Budgeter, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Rosiana, Ruth, 2011, Tesis, *Pelaksanaan Pungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Pring Sewu*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta

Widiawati, Nani, 2011, Skripsi, *Implikasi Peralihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Menjadi Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pemungutan BPHTB Di Kabupaten Bantul)*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta

Widhyarsi, Dyah Purworini, 2008, Tesis, *Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas Hibah Wasiat Di Jakarta Barat*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Wiyana, Dwi Apriliyani, 2010, Tesis, *Tanggung Jawab PPAT Terhadap Titipan Pajak BPHTB dari klien: Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Reg;181/Pid.B/2009/PN.Btl*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Yulvan, H.Edral, 2008, Tesis, *Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Mengawasi Dan Mengamankan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai salah Satu Sumber Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

D. INTERNET

Karim, Zulkarnain, "Peralihan Dan Pengelolaan PBB Dan BPHTB", <http://www.jawapost.com, di> akses pada tanggal 1 Maret 2012.